

TRANSPARANSI PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO

Maryam D. Poma & Anggriani N. Mbuinga

STIA Bina Taruna Gorontalo

maryamdroma@gmail.com¹ & bukujurnalstia@binataruna.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, fokus pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Fokus komunikasi publik dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang tidak tahu tentang KUBE. Fokus keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota kelompok yang belum paham secara tuntas terkait dengan program KUBE. Fokus kemudahan akses informasi dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan wadah atau akses bagi masyarakat sebagai tempat aduan terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

Disarankan, perlu adanya bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango terkait dengan capaian atau hasil pelaksanaan program KUBE. Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi atau sosialisasi secara menyeluruh dan langsung kepada kelompok sasaran terkait dengan program KUBE. Perlunya menerapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyiapkan situs data yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah, kapan dan dimanapun. Perlunya membentuk dan menyiapkan satu wadah khusus bagi peserta kelompok Kube sebagai tempat aduan dalam pelaksanaan program KUBE.

Kata Kunci: Transparansi, Kelompok Usaha Bersama

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperjelas

dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan

nasional diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Angka statistik memberikan informasi bahwa masih banyak jumlah penduduk miskin, dimana hal tersebut bersifat dinamis dengan melihat kondisi perekonomian nasional yang belum stabil. Sebagai contoh, Propinsi Gorontalo yang telah banyak mengadakan kegiatan sebagai penanggulangan kemiskinan, namun faktanya masih banyak dijumpai keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2016 pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Strategi dalam pengentasan kemiskinan banyak ditawarkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, seperti penyediaan lapangan kerja dan program kecakapan vokasional bagi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat mengandung arti sebagai usaha sadar, sistematis, dan terarah yang

diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat bertujuan mengubah taraf kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik.

Strategi pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas masyarakat melalui pembedayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yaitu proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik secara individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat diharapkan dapat menunjang penanggulangan kemiskinan sehingga dapat berjalan lebih efektif.

Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Manusia mempunyai peran sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Pemberdayaan dan pembangunan memiliki kaitan yang erat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk kemandirian dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Upaya peningkatan kualitas hidup diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Arah

pembangunan masyarakat desa yang paling efektif dan tepat untuk mencapai tujuan adalah program yang melibatkan atau memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Arah tersebut hendaknya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, sehingga akan tepat sasaran dan pembangunan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menerapkan pemberdayaan masyarakat yang berpengaruh dengan melibatkan seluruh aspek pembangunan serta menggunakan kemitraan untuk membuka akses dalam menciptakan keberdayaan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara berkelompok. Salah satu penanggulangan kemiskinan berbasis program kelompok yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menciptakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini merupakan gagasan yang dapat memberikan pemberdayaan bagi masyarakat kecil dengan meningkatkan kualitas hidup anggota. Program KUBE dilaksanakan langsung oleh masyarakat dengan pedoman dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui program keterampilan menciptakan sebuah usaha. Program KUBE merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di pedesaan, sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menekan masalah sosial dengan mengoptimalkan potensi yang ada (*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2015*).

Salah satu tujuan program KUBE adalah membantu memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang perlu disejahterakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, program KUBE belum sepenuhnya berhasil direalisasikan di seluruh Indonesia. Masih banyak ditemukan kendala di lapangan khususnya dari pemerintah daerah atau dinas terkait sebagai penyelenggara program KUBE.

Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu instansi yang dipercaya untuk melaksanakan program KUBE di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kehadiran program KUBE sendiri bersamaan dengan awal terbentuknya Kabupaten Bone Bolango yakni pada tahun 2003 dan hingga saat ini jumlah KUBE yang ada di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 239 kelompok dengan jumlah anggota perkelompok sebanyak 10 orang. Secara umum bantuan yang diberikan dari program KUBE adalah dalam bentuk uang dengan kisaran 20 juta perkelompok.

Dalam pelaksanaannya, program KUBE di wilayah Kabupaten Bone

Bolango belum sepenuhnya berhasil. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan keterbukaan atau transparansi program. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Pada hakikatnya, prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu aspek komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Sejauh ini transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dilihat dari aspek transparansi belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya bentuk pertanggungjawaban secara terbuka yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial kepada masyarakat atas capaian dari pelaksanaan program KUBE. Kurangnya komunikasi publik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yakni Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh dan terperinci kesegala lapisan masyarakat sehingga banyak dari masyarakat luas yang belum memahami secara baik tentang program KUBE. Kurang terbukanya pihak Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dalam memberikan ruang kepada masyarakat sehingga informasi secara jelas terkait dengan pelaksanaan program tersebut kurang mampu diserap dengan baik oleh kelompok penerima bantuan sehingga banyak

kelompok yang kurang mampu memenuhi target ataupun sasaran dari program KUBE. Terakhir adalah minimnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program KUBE. Hal ini terlihat dari ketiadaan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango sebagai wadah bagi masyarakat ataupun kelompok penerima bantuan untuk mengadukan permasalahan yang ada.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan dan kajian baru dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik dan merangsang dilakukannya penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, sebagai masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango agar transparansi dalam pelaksanaan program KUBE.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari informan yang diwawancarai. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian (Bungin, 2007).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah (a) Pertanggungjawaban terbuka, dimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan secara terbuka terkait dengan pelaksanaan program KUBE; (b) Komunikasi Publik, dimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango di dalam memasyarakatkan program KUBE; (c) Keterbukaan Informasi, dimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyediaan ruang terbuka bagi masyarakat atau kelompok penerima bantuan dalam memperoleh informasi

terkait dengan pelaksanaan program KUBE; dan (d) Kemudahan akses informasi, dimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya akses yang mudah bagi kelompok penerima bantuan dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut uraian pembahasan terkait dengan transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus penelitian; pertanggungjawaban, komunikasi publik, keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi.

1. Pertanggungjawaban

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah bentuk pertanggungjawaban oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan secara terbuka terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

Hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus pertanggungjawaban belum optimal.

Hal ini terlihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan secara *down-up* (bawah ke atas) melalui pembuatan laporan

yang berisikan materi pelaksanaan program KUBE, namun di lain sisi, belum ada pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango mulai hasil verifikasi, seleksi hingga capaian dari program KUBE.

2. Komunikasi

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango di dalam memasyarakatkan program KUBE. Hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus komunikasi publik belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang belum tersentuh oleh program KUBE bahkan masih ada sebahagian masyarakat yang sama sekali tidak tahu akan adanya program pemerintah yang bernama KUBE.

3. Keterbukaan

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan keterbukaan adalah penyediaan ruang terbuka bagi masyarakat atau kelompok penerima bantuan dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

Hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus keterbukaan informasi belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota kelompok yang belum paham secara tuntas terkait dengan program KUBE sehingga timbul kekhawatiran dari anggota kelompok khususnya terkait dengan dampak pengelolaan dana bantuan.

4. Kemudahan

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kemudahan adalah akses yang mudah bagi kelompok penerima bantuan dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

Hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus kemudahan akses informasi belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan wadah atau akses bagi masyarakat sebagai tempat aduan terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih belum adanya pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango, masih

minimnya kegiatan sosialisasi dalam memasyarakatkan program KUBE, masih banyaknya anggota kelompok yang belum paham secara tuntas terkait dengan program KUBE dan ketiadaan wadah atau akses bagi masyarakat sebagai tempat aduan terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa (1) Transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus pertanggungjawaban belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango mulai hasil verifikasi, seleksi hingga capaian dari program KUBE; (2) Transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus komunikasi publik belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang belum tersentuh oleh program KUBE bahkan masih ada sebahagian masyarakat yang sama sekali tidak tahu akan adanya program pemerintah yang bernama KUBE; (3) Transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus keterbukaan informasi belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota kelompok yang belum paham

secara tuntas terkait dengan program KUBE sehingga timbul kekhawatiran dari anggota kelompok khususnya terkait dengan dampak pengelolaan dana bantuan; (4) Transparansi pelaksanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus kemudahan akses informasi belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan wadah atau akses bagi masyarakat sebagai tempat aduan terkait dengan pelaksanaan program KUBE.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perlu adanya bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango terkait dengan capaian atau hasil pelaksanaan program KUBE; (2) Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi atau sosialisasi secara menyeluruh dan langsung kepada kelompok sasaran terkait dengan program KUBE; (3) Perlunya menerapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyiapkan situs data yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah, kapan dan dimanapun; (4) Perlunya membentuk dan menyiapkan satu wadah khusus bagi peserta kelompok Kube sebagai tempat aduan dalam pelaksanaan program KUBE; dan (5) Perlunya melaksanakan program KUBE secara transparan dengan mengoptimalkan bentuk pertanggungjawaban, komunikasi publik, keterbukaan

informasi dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, 2010. *Birokrasi*, (Cetakan Ketiga) Tiara Wacana, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi 2009. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo.
- Danim, Sudarwan. (2011). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dimock & Fox, 2007. *Administrasi Negara Jilid 1 dan 2*. Rieneka Cipta. Jakarta
- Dunn, W. N. (2009). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
- Gie, The Liang 2010. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Modern Liberty
- Guntur, Setiawan, 2010. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya offset.
- Hasan Shadily. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismani, 2009. *Debirokrasi dan Deregulasi*. Jakarta: Obor.
- LAN, 2008. *Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Kadarwati, 2008. *Administrasi Negara Pembangunan*. Jakarta: Karunia LP3ES.
- Keban, Jeremias T.2008. *Enam dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, Luthfi J. Mokhammad Najih. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. Malang: Trans Publishing
- Kusdi, 2009, *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan, Yogyakarta.
- Marzuki, 2012. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia
- Moleong, Jexy J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nurdin Usman, 2009. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rosenbloom, David H, 2008. *Public Administration; understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. 6th edition. Mc Graw Hill International Edition. New York
- Santoso, Pandji., 2008, "Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance", Cet.Pertama, Bandung: PT.Refika Aditama
- Santoso, 2009. *Birokrasi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik*

- Di Era Otonomi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sri Yuliani, 2009. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret,
- Sugiyono, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sulistiyani Ambar Teguh, 2011. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia: Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. (2008). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Ulbert Silalahi, 2011. *Pengantar Ilmu administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Wibawa, S. (2007). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen Lain:

- UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2015. Tentang. *Kelompok Usaha Bersama*.